

Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap

Rizka Khairunnisa ^{1*}, Roni Ekha Putera ², Yoserizal ³

¹²³Jurusan Administrasi Publik, Universitas Andalas, Indonesia

¹ rizkahn23@gmail.com ² roniekhaputera@soc.unand.ac.id ³ yoserizal@soc.unand.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2021-03-09

Revised 2021-05-20

Accepted 2021-06-30

Keywords

Coordination,

Disaster management,

Haze Disaster

ABSTRACT

Kampar Regency is one of the areas that are included in six areas prone to smog in Riau Province. Moreover, of the six smog-prone areas in Riau Province, Kampar Regency is also the district with the largest population of the other five regions. Thus, inevitably resulting in more and more people being affected by the emergence of smog. Thus, of course the Kampar Regency Government has coordinated with relevant agencies in overcoming this haze disaster. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the coordination of the Kampar Regency Government in Haze Disaster Management. The research method used is qualitative descriptive through in-depth interviews with competent parties stating that in measuring coordination there are four main variables, namely unity of action, division of labor, communication and discipline. Based on the results of the study it can be concluded that the coordination of the Kampar Regency government in dealing the haze disaster has been running quite well.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak wilayah yang rentan akan terjadinya sebuah bencana. Bencana yang terjadi tersebut dapat berupa bencana alam, Bencana non alam dan bencana sosial. Bencana yang beberapa tahun terakhir rutin terjadi di Indonesia adalah bencana kabut asap (Fauziah:2006). Bencana kabut asap yang sering terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan seolah menjadi isu tahunan yang selalu melanda Indonesia terutama di pulau Sumatera dan di pulau Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Tahun 2019 mencatat bahwa dari bulan Januari hingga September 2019 yang lalu tercatat luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 857.755 ha yang terdiri dari lahan mineral 630.451 ha dan lahan gambut 227.304 ha. Pada pulau Sumatera, Provinsi Riau memiliki jumlah Karhutla yang paling luas. Dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau menyebutkan terdapat 6 daerah rawan bencana Kabut asap. Dimana salah satu nya adalah Kabupaten Kampar yang merupakan daerah dengan kerentanan Karhutla tertinggi. (Yuliani dan Rahman:2018)

Penyebab bencana kabut asap terbanyak adalah akibat adanya metode pembukaan lahan yang masih mengandalkan metode pembakaran. Masalah non teknis juga ikut berpengaruh seperti soal koordinasi antar instansi yang tidak maksimal dan sikap mental sebagian pihak yang tidak berkomitmen pada kelestarian lingkungan. Dimana UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada Pasal 69 sudah menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun pada kenyataannya, setiap tahun khususnya di Provinsi Riau yang mana dalam hal ini adalah Kabupaten Kampar walaupun telah diatasi namun masih saja terjadi bencana kabut asap lagi pada setiap tahun berikutnya.

Bencana kabut asap memiliki dampak dan kerugian yang sangat banyak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Rasyid:2014) yang menyebutkan bahwa bencana kabut asap memiliki banyak dampak dari berbagai segi kehidupan yang akan mengganggu aktivitas penduduk. Misalnya seperti terganggunya jarak pandang, rusaknya polusi udara, terganggunya perjalanan transportasi baik melalui darat, laut maupun udara. Selanjutnya dampak tertinggi yang sering terjadi adalah turunnya tingkat



kesehatan penduduk. Padahal Indonesia merupakan bagian dari komunitas dunia yang bertanggungjawab untuk melindungi rakyatnya sendiri dari ancaman bencana sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berikut ini merupakan Tabel Laporan Kasus Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Di Enam Daerah Rawan Bencana Kabut Asap Di Provinsi Riau Tahun 2019. Tabel 1.1 Jumlah Penderita ISPA Di Daerah Rawan Bencana Kabut Asap Di Provinsi Riau Tahun 2019 :

No.	Daftar Daerah Rawan Bencana Kabut asap	Jumlah Penduduk
1.	Kabupaten Pelalawan	2.224 Jiwa
2.	Kabupaten Rokan Hilir	670 Jiwa
3.	Kabupaten Bengkalis	421 Jiwa
4.	Kabupaten Kampar	4.152 Jiwa
5.	Kabupaten Meranti	610 Jiwa
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	1.806 Jiwa

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019

Dapat dilihat bahwa Kabupaten Kampar merupakan daerah tertinggi yang terkena penyakit ISPA dari enam daerah rawan bencana kabut asap lainnya. Dimana Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau ISPA merupakan salah satu penyakit yang sangat banyak terjadi ketika munculnya bencana kabut asap. Selanjutnya, Kabupaten Kampar juga merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dari daerah rawan bencana bencana kabut asap lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dampak yang sangat berpengaruh dan meresahkan penduduk yang mengalami bencana kabut asap merupakan terganggunya kesehatan penduduk. Dimana (Kusmajaya:2019) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa di Provinsi Riau, jika dilihat dari kerentanan kebakaran hutan dan lahan tertinggi berada di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga memang sudah seharusnya dilakukan penanggulangan bencana kabut asap oleh Pemerintah Kabupaten Kampar secara baik.

Pada dasarnya, penanggulangan bencana kabut asap tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja. Walaupun pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan menyebutkan proses penanggulangan bencana kabut asap akibat adanya karhutla dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja. Namun tetap harus ada koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait agar penanggulangan kabut asap lebih dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Padahal sebuah koordinasi yang ideal dalam penanggulangan bencana merupakan koordinasi yang mampu dan dapat saling menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara organisasi terkait sehingga masing-masing organisasi mampu melaksanakan pembagian tugas guna mencapai efektivitasnya pelaksanaan penanggulangan bencana. Dimana nantinya satu organisasi tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi lainnya (Soenata:2018). Maka berdasarkan penjelasan tersebut, agar permasalahan bencana kabut asap dapat diatasi secara cepat dan tepat, harus ada koordinasi yang dilakukan antara instansi pemerintah daerah terkait. Sehingga dapat mengurangi dampak dari bencana kabut asap tersebut khususnya pada dampak kesehatan.

Perhatian pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Riau dalam era desentralisasi ini cukup serius dalam menangani bencana kabut asap yang terjadi di wilayah Riau. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya instansi dalam pemerintahan daerah yang diberikan tanggung jawab secara bersama-sama untuk melakukan koordinasi tentang penanganan masalah bencana kabut asap. (Fajar:2018).

Sehingga mengenai Bencana Kabut Asap Pemerintah Kabupaten Kampar Secara Teknis Dalam Penanggulangan Bencana Berkoordinasi Dengan Instansi Berikut Ini adalah:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar *leading sector* yang berwenang melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait untuk melakukan bagaimana pencegahan bencana dalam hal ini adalah bencana kabut asap yang ada di Kabupaten Kampar.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Penyelenggara fungsi pencegahan dan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas dari lingkungan hidup.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Yang memiliki tugas pokok dan fungsi didalam merumuskan kewenangan dibidang kesehatan dan juga unsur pelaksana kegiatan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Namun pada kenyataannya, koordinasi yang dilakukan sering kali belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut terbukti dengan selalu terjadinya bencana kabut asap khususnya di Kabupaten Kampar pada setiap tahunnya. Salah satu contohnya adalah seperti saat dilakukannya rapat koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar selaku *Leading sector* dalam pelaksanaannya masih ada instansi terkait yang tidak disiplin karena tidak mengirimkan perwakilan dari Instansi nya untuk ikut dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan. Hal tersebut nantinya pasti akan berpengaruh terhadap kurang baiknya komunikasi yang terjalin antara instansi terkait tersebut. Sehingga akan berpengaruh terhadap pembagian kerja dan kesatuan tindakan yang ingin dilakukan kedepannya. Karena menurut (Hasibuan:2011) dalam melakukan sebuah koordinasi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan sangat penting yang harus dilakukan dengan baik agar nantinya koordinasi dan pencapaian tujuan dapat tercapai dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Karena satu organisasi tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi lainnya. Dengan demikian, jika setiap daerah yang termasuk kedalam daerah rawan terjadinya bencana kabut asap yang ada di Provinsi Riau dapat melakukan koordinasi dengan baik disetiap penanggulangan bencana khususnya bencana kabut asap, maka akan dapat membantu mewujudkan slogan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau untuk mewujudkan "Riau Tanpa Asap".

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan adalah Bagaimana Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap ?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Koordinasi

Istilah Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang berkaitan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur hal tertentu. Selanjutnya menurut (Ndraha:2011) koordinasi juga diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu, sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Sedangkan menurut (George R. Terry) Koordinasi adalah sinkronasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Koordinasi

Menurut (Dann Sugandha:1991) indikator-indikator yang terdapat pada teori koordinasi terbagi menjadi 6 yaitu :

1. Unit-unit atau organisasi : kelompok kerja didalam suatu organisasi yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda.
2. Sumber-sumber (Potensi) : potensi yang ada pada unit-unit suatu organisasi berupa tenaga kerja, keterampilan, dan pengetahuan personil, anggaran serta fasilitas kerja lainnya.
3. Gerak kegiatan : segala daya upaya atau segala suatu tindakan yang dikerjakan oleh suatu kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya.
4. Kesatupaduan : kaitan atau hubungan di antara sesama unit organisasi sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan.
5. Keserasian : adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis, tidak menimbulkan tugas ganda maupun pertentangan dalam koordinasi.
6. Arah yang sama (sasaran) : pengerahan segala potensi unit organisasi pada satu sasaran yang sama sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi organisasi.

Sedangkan menurut (Hasibuan) dalam Jurnal Manoppo dkk berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan tindakan : keserasian dengan mengatur jadwal waktu agar kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan terwujudlah hasil yang diharapkan.
2. Komunikasi : Bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain.
3. Pembagian Kerja : Perincian tugas untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Disiplin : Kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan organisasi dan norma yang berlaku.

Sehingga dari beberapa indikator koordinasi di atas peneliti menggunakan 4 indikator menurut (Hasibuan) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam melihat bagaimana koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana kabut asap. Diantaranya adalah kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang berkompeten dan dapat memberikan data serta keterangan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Pelaksanaan Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini seperti adanya peraturan, laporan, dan dokumen lainnya.

Data dokumentasi yang digunakan disini berupa peraturan-peraturan, surat keputusan, laporan tahunan, arsip, dan pamflet ataupun baliho mengenai bencana kabut asap. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok yaitu adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sedangkan untuk pembenaran hasil atau *crosscheck* hasil penelitian dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dan Masyarakat Peduli Api atau MPA yang merupakan relawan dalam penanggulangan bencana kabut asap dan juga merupakan masyarakat yang merasakan langsung dampak dari bencana kabut asap tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap. Dalam mengukur sebuah koordinasi terdapat empat variabel utama yaitu kesatuan tindakan, pembagian kerja, komunikasi dan disiplin. Sehingga Pelaksanaan mengenai koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana kabut asap ini perlu dinilai dan dianalisis dengan indikator-indikator yang telah disebutkan tersebut.

Kesatuan Tindakan

Dari segi kesatuan tindakan, menurut Hasibuan kesatuan tindakan ini memang merupakan inti dari sebuah koordinasi dan pada dasarnya kesatuan tindakan merupakan suatu kewajiban dari pimpinan

untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang dimaksudkan agar kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sehingga dengan demikian terwujudlah keserasian hasil yang diharapkan oleh masing-masing instansi terkait.

Dalam mengatur jadwal dan waktu koordinasi dilakukan dengan cara adanya kegiatan apel siaga dan sebuah rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait yang pada biasanya dilakukan setiap awal tahun. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar selalu menetapkan jadwal dan waktu untuk melaksanakan rapat koordinasi. Sehingga nantinya instansi terkait dimana dalam hal ini khususnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar akan diberikan surat undangan untuk dapat melakukan rapat koordinasi mengenai kabut asap.

Walaupun koordinasi disini *leading sector* nya merupakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar namun jadwal dan kegiatan dalam penanggulangan bencana kabut asap dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi karena setelah adanya hasil rapat koordinasi, kegiatan yang ingin dilakukan menggunakan sistem komando dari masing-masing instansi terkait. Sehingga dengan adanya jadwal dan waktu yang telah ditentukan dengan jelas diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam keserasian dalam mencapai hasil disini Pelaksanaan kegiatan koordinasi yang terkait penanggulangan bencana kabut asap dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait namun tetap berkoordinasi secara efektif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar hingga dapat saling menunjang. Sebagai instansi teknis yang lebih bertugas setelah adanya pencemaran udara akibat tebalnya kabut asap yang muncul, disini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar membentuk relawan Masyarakat Peduli Api (MPA). MPA adalah komunitas atau relawan masyarakat yang dibentuk dalam membantu penanggulangan bencana kabut asap.

Sebagai instansi pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Kampar, disini Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar juga sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi, Seperti dengan adanya pendataan penyakit ISPA secara berkala. Koordinasi antar pemerintah Kabupaten Kampar yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memang sangat dibutuhkan keserasian dari masing- masing pihak. Yang mana tujuannya adalah untuk mencapai hasil bersama karena koordinasi yang dilaksanakan dalam penanggulangan bencana kabut asap ini diharapkan dapat berjalan lancar dan instansi yang dilibatkan dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan instansi yang terlibat pada koordinasi dalam penanggulangan bencana kabut asap ini sudah melakukan kerjasama dengan cukup baik sesuai tupoksinya.

Komunikasi

Dari segi komunikasi, dalam sebuah pelaksanaan koordinasi sebuah komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan agar nantinya suatu instansi dan instansi terkait lainnya dapat saling berinteraksi dan kegiatan koordinasi yang ingin dilaksanakan dapat terlaksanakan dengan baik. Karena komunikasi juga merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan yang saling berinteraksi dengan menggunakan sebuah saluran yang digunakan. Sehingga keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan sebuah komunikasi.

Disini yang menjadi Komunikator nya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar selaku *leading sector* dalam penanggulangan bencana kabut asap di Kabupaten Kampar. Dalam penanggulangan bencana kabut asap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar selaku *leading sector* disini harus selalu memberikan informasi kepada lintas sektor terkait.

Selanjutnya Komunikan dalam koordinasi pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana kabut asap disini yang menjadi komunikannya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Disini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berusaha semaksimal mungkin melaksanakan segala informasi yang berbentuk instruksi, himbauan dll. Dalam proses komunikasi masih terjadi sedikit kekurangan dalam pelaksanaannya. Maksud dari kurangnya disini adalah masih

kurang tersampainya informasi dari *leading sector* kepada pihak penerima pesan seperti yang dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang beberapa kali merasa tidak menerima surat undangan untuk dapat melakukan rapat koordinasi. Maka mengakibatkan kurangnya kesamaan informasi yang diterima. Jadi dengan demikian, dapat dilihat masih kurang efektifnya komunikasi antar komunikator dan komunikan yaitu pihak penerima informasi.

Dalam Informasi disini Informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar selaku *leading sector* mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana kabut asap yang harus dilakukan oleh instansi terkait. Adanya informasi kepada masyarakat mengenai betapa bahayanya bencana kabut asap ini jika tidak dapat ditanggulangi secara tepat dan tepat

Selanjutnya dalam komunikasi disini yang terakhir adalah Saluran, Pelaksanaan koordinasi pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana kabut asap disini selain rapat koordinasi yang dilakukan secara langsung, juga menggunakan media elektronik. Contohnya seperti menggunakan *Smartphone*. Selanjutnya setelah itu kita juga membuat grup *whatsapp* sehingga nantinya jika ada informasi yang akan kita sampaikan bisa disalurkan melalui *whatsapp group* tersebut. Selanjutnya untuk mengirimkan informasi dalam bentuk file penting kita juga menggunakan *email*. Sehingga dengan demikian, dapat dilihat sudah banyaknya saluran atau pun media yang digunakan untuk dapat berkomunikasi dalam pelaksanaan proses koordinasi.

Pembagian Tugas

Dari segi perincian tugas dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana kabut asap dibutuhkan peran masing-masing instansi yang terlibat. Dimana perincian tugas masing-masing instansi terlibat disini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut. Disini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Sebagai instansi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Kampar khususnya dalam bencana kabut asap kami selalu melaksanakan dengan sebaik mungkin. Misal pada saat terjadinya bencana kabut asap, kami harus siap turun kapanpun. pada biasanya setiap desa memiliki dana untuk bencana. Nah disana nanti kita dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar juga mengarahkan kepada kepala desa tersebut untuk dapat membeli perlengkapan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana sesuai yang sering terjadi di desa tersebut. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar juga sering melakukan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya nya dampak dari kabut asap akibat adanya kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya kalau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar disini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar ada membentuk yang namanya Masyarakat Peduli Api atau MPA. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar juga memberikan info terkini mengenai Indeks Standar Kualitas Udara (ISPU) pada masyarakat yang biasanya juga dilakukan melalui radio. Karena papan ISPU belum tersedia di Kabupaten khususnya Kabupaten Kampar.

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar juga Memberikan instruksi kepada puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Kampar untuk dapat mendata kasus ISPA yang muncul setiap harinya di Kabupaten Kampar. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar juga memberikan masker secara gratis. Dan terakhir Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar juga membuat posko-posko kesehatan yang nanti akan selalu siap siaga membantu masyarakat khususnya seperti pada ibu hami, lansia, balita dan yang terkena dampak dari bencana kabut asap tersebut. Sehingga dengan adanya perincian tugas, disini diharapkan setiap instansi terkait mampu melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan jelas. spesifik, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses tercapainya tujuan dalam penanggulangan bencana kabut asap tersebut.

Disiplin

Dari segi disiplin, pada dasarnya menurut (Hasibuan:2011) setiap organisasi yang kompleks, harus bekerja secara terkoordinasi agar dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Disiplin disini adalah suatu sikap atau perilaku seseorang dalam menaati semua peraturan yang berlaku. Sehingga mengenai koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana kabut asap disini setiap instansi terkait sudah berusaha disiplin dengan bertanggungjawab melaksanakan tugas sesuai

dengan tupoksinya masing-masing berdasarkan ketetapan waktu yang telah ditentukan. Terbukti hal tersebut dibenarkan oleh pihak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau yang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar memang merupakan salah satu kabupaten yang aktif dalam setiap koordinasi. Khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar yang sebagai *leading sector*. Mereka cukup aktif terlihat dari bagaimana tanggungjawab mereka dalam setiap pelaporan mengenai bencana khususnya bencana kabut asap.

Terakhir adalah Aturan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar yang merupakan *leading sector* ternyata menyebutkan bahwa sejauh ini dalam kegiatan koordinasi mengenai penanggulangan bencana kabut asap setiap lintas sektor terkait bisa dikatakan disiplin. Sehingga sejauh ini kami tidak atau belum ada membuat aturan khusus karena selama ini dalam berkoordinasi semua lintas sektor terkait cukup disiplin. Walaupun memang dalam beberapa kegiatan misalnya seperti pada rapat koordinasi terkadang masih ada beberapa perwakilan dari lintas sektor terkait yang tidak menghadiri misalnya rapat koordinasi akibat kurangnya informasi yang didapatkan. Karena pada dasarnya dalam koordinasi jika ingin terlaksana dengan baik seluruh instansi terlibat memang harus memiliki sikap yang disiplin agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap disini dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

Koordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana kabut asap ternyata sudah dilakukan dengan cukup baik walaupun pada beberapa kegiatan yang dijalankan oleh instansi terkait masih ada yang belum berjalan secara maksimal karena adanya beberapa kendala yang terjadi. Dimana dalam bencana, khususnya bencana kabut asap koordinasi merupakan satu hal yang sangat penting. Karena sebenarnya walaupun sudah ada koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tersebut tetap juga harus ada koordinasi yang baik pula dari pemerintah daerah rawan bencana kabut asap lainnya yang ada di Provinsi Riau agar nantinya dapat mewujudkan slogan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau yaitu “Riau Tanpa Asap”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fajar. 2018. Sinergisitas Instansi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pada Tahun 2015. *Jom Fisip* Vol. 5 Nomor 1
- Manoppo, I.R.A, dkk. 2017. Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 2 No.2. ISSN : 2337- 5736
- Tiurrina, Soneta. 2018. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Sinabung. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara
- Kusmajaya, et all. 2019. Pemetaan Bahaya dan Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. *Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan*. Vol 2 No (2) : Januari-Juni 2019
- Yuliani, Febri,. Rahman, Aulia. 2018. Metode Restorasi Gambut Dalam Konteks Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sosio Informa*. Volume 4, Nomor 2
- Fachmi, Rasyid. 2014. Permasalahan Dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. Edisi 1 Nomor 4 P.47 – 59. ISSN: 2355-4118
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Edisi 3*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Denzin, Norman K., Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Syafiie, Inu Kencana dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta. Jakarta